

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN DAN KOTA SE-JAWA TIMUR PADA TAHUN 2011-2019

DITERIMA

Agustus 2023

DIREVISI

September 2023

DISETUJUI

Oktober 2023

**INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

Andhika Bhagaskara

Email:

andhikabhagas@student.
ub..ac.idFakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Brawijaya, Indonesia**Andhika Bhagaskara**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: *There has been high economic growth in East Java Province, as evidenced by a decrease in the Gini Ratio. To reduce income inequality, there is a need for strengthening wage policy systems and equitable government expenditures, as well as investment in sectors that are still lagging behind. Additionally, access to education, healthcare, and job creation also need to be reinforced to reduce the disparity between districts and cities in East Java. This study used panel data regression analysis to analyze the influence of independent variables such as economic growth rate, minimum wage, working population, human development index, government expenditures, and investment on the Gini Ratio. The results of the study indicate that the economic growth rate does not have a significant impact on the Gini Ratio, while minimum wage, human development index, government expenditures, and investment have a significant influence on the Gini Ratio, with a negative impact on minimum wage and investment, and a positive impact on the human development index and government expenditures. However, the variable of working population does not have a significant influence on the Gini Ratio.*

Keywords: *Income inequality, Economic Growth, Minimum Wage, Employed Workforce, Human Development Index, Government Expenditure, Investment*

Abstrak: Terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada Provinsi Jawa Timur, terlihat dari penurunan nilai Gini Rasio. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, diperlukan penguatan sistem kebijakan upah dan pengeluaran pemerintah yang merata serta penanaman modal atau investasi pada sektor yang masih tertinggal. Selain itu, akses pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja juga perlu diperkuat untuk mengurangi kesenjangan antara Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel untuk menganalisis pengaruh variabel bebas, seperti laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, angkatan kerja yang bekerja, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, dan investasi terhadap Gini Rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Gini Rasio, sementara upah minimum, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, dan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Gini Rasio, dengan pengaruh negatif pada upah minimum dan investasi, dan pengaruh positif pada indeks pembangunan manusia dan pengeluaran pemerintah. Namun, variabel angkatan kerja yang bekerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Gini Rasio.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum, Angkatan kerja, Indeks pembangunan manusia, Pengeluaran pemerintah, Investasi

Cite this as:

Bhagaskara, A. 2023. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur Pada Tahun 2011-2019. *Journal of Development Economic and Social Studies*. Volume 02, Number 4, Pages 827-843. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdessa.2023.02.4.10>

PENDAHULUAN

Berdasarkan data perkembangan pertumbuhan ekonomi menurut BPS, pada wilayah Jawa Timur dari tahun 2011–2019 mengalami penurunan meskipun sempat mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 6,64%, namun hingga pada akhir 2019 PDB Jawa Timur hanya mengalami peningkatan sebesar 5,53% dari tahun sebelumnya tahun 2018 sebesar 5,47%, memang jika dibandingkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Jawa Timur masih relatif tinggi terhadap Indonesia. Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa porsi kontribusi perekonomian di Jawa Timur pada tahun 2019 terhadap perekonomian Nasional menempati posisi terbesar kedua setelah provinsi Jakarta yaitu sebesar 14,62% dan Jakarta sebesar 17,55%.



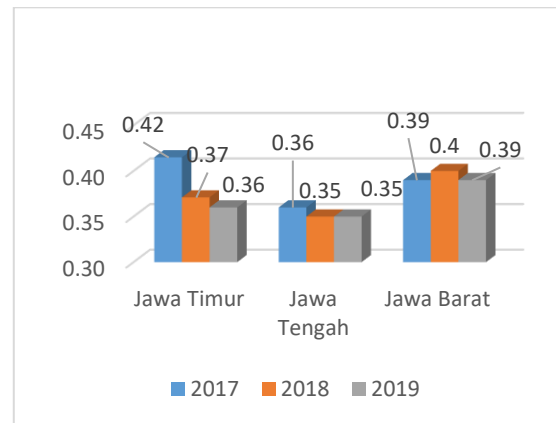
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Jawa Timur 2011-2019 (persen)

(Sumber: BPS data diolah penulis, 2022)

Berlanjut, mengenai ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan telah menjadi topik yang semakin relevan dan penting dalam studi ekonomi modern. Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ketimpangan pendapatan telah menjadi perhatian utama di banyak negara di seluruh dunia. Ketimpangan pendapatan mengacu pada ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di antara anggota suatu masyarakat atau populasi.

Peningkatan ketimpangan pendapatan telah menimbulkan berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Ketidaksetaraan pendapatan dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, ketegangan sosial, dan

memperburuk kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial, mobilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



Gambar 2. Perkembangan Gini Rasio 2017–2019

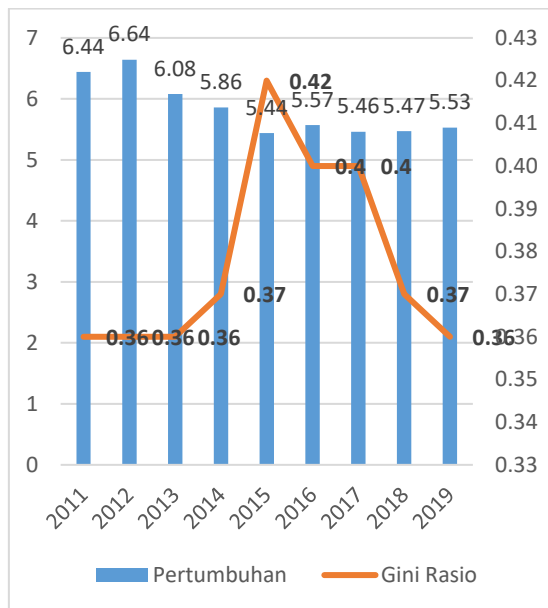
(Sumber: BPS data diolah penulis, 2022)

Dapat dilihat pada gambar 2 sebagai pembandingan pada, perkembangan terakhir pada tahun 2017- 2019 pada indeks Gini di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat menunjukkan bahwa, ketimpangan pendapatan pada Provinsi Jawa Timur masih tergolong dalam kategori sedang, begitu pun juga dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Pada tahun 2017-2019 Indeks Gini Jawa Timur menunjukkan adanya penurunan dengan rata-rata sebesar 0,38, meskipun sempat memuncak pada nilai 0,42 pada tahun 2017 hal ini menandakan bahwa, penanganan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan masih menjadi fokus penting dalam tugas pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan perkapita pada masyarakatnya. Berbeda dengan Jawa Tengah yang hanya turun 0,01 poin dari tahun 2017 ke 2018-2019 dengan rata-ratanya sebesar 0,35, memang perubahan tersebut tidak terlihat secara signifikan seperti Provinsi Jawa Timur namun angka Gini Rasio pada Jawa Tengah masih dalam kategori sedang selama 2017-2019. Kondisi ini berbeda pada Provinsi Jawa Barat yang dimana, nilai indeks Gininya lebih tinggi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun tahun 2017-2019 dengan rata-ratanya sebesar 0,39, meskipun turun kembali 0,01 poin pada tahun 2019 yang sebelumnya pada tahun 2018

sebesar 0,40 poin pada Indeks Gini Jawa Barat, yang dimana jika dilihat dari perkembangannya ketiga Provinsi tersebut memang masih termasuk dalam ketidakmerataan sedang.

Namun nilai perbedaan tersebut menunjukkan pemerintah dan lembaga terkait masih perlu menerapkan kebijakan ekonomi dan sosial yang adil, mempromosikan inklusi ekonomi, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

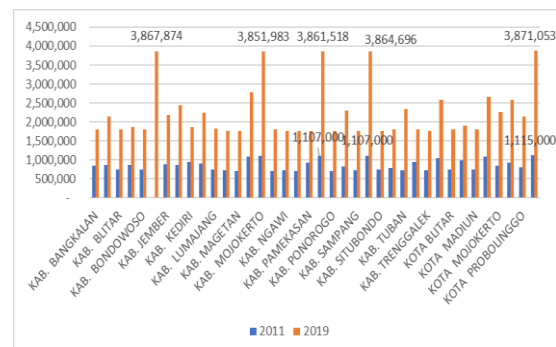


Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur (persen) dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur 2011-2019

(Sumber: BPS data diolah penulis, 2022)

Mengingat pengukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Gini Rasio, yang berkaitan dengan pendapatan perkapita, berdasarkan data diatas pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 – 2019 mengalami penurunan dan yang menjadi sumber masalah adalah pada angka Gini Rasio pada Jawa Timur. Meskipun angka Gini Rasio pada Jawa Timur mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2015 sempat naik pada 0,52 poin namun angka Gini Rasio Jawa Timur mengalami penurunan kembali hingga pada tahun 2019 mencapai 0,36 hal tersebut masih menunjukkan bahwa nilai Gini rasio Provinsi Jawa Timur masih pada kategori sedang,

namun hal ini bisa disebabkan karena ketidaksetaraan akses ke sumber daya, ketidaksetaraan akses ini dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok yang memiliki akses yang lebih baik dengan mereka yang memiliki akses terbatas, ketidaksetaraan keterampilan dan pendidikan pada tenaga kerja pada daerah yang sudah maju dan masih terbelakang, sebagian besar pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di sektor-sektor yang lebih maju dan produktif, seperti industri dan jasa yang canggih, dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan meningkatnya kesenjangan antara sektor modern dan sektor tradisional atau informal, kesenjangan upah, faktor-faktor seperti negosiasi kekuatan pekerja, perbedaan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan, serta kebijakan upah minimum dapat mempengaruhi tingkat kesenjangan upah dan, akibatnya, ketimpangan pendapatan, diskriminasi dan ketidakadilan sosial, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial-ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Memang Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya dianggap sebagai indikator keberhasilan ekonomi suatu negara, tetapi pertumbuhan yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan pendapatan semakin parah.



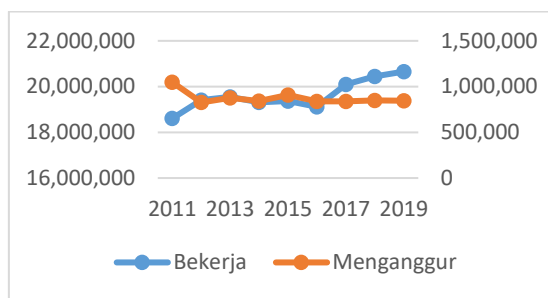
Gambar 4. Besaran Upah Minimum pada kabupaten dan kota Se-Jawa Timur 2011 dan 2019

(Sumber: BPS data diolah penulis, 2022)

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2011–2019 menunjukkan penurunan, atau adanya perlambatan pertumbuhan. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah, namun upah minimum juga dapat menggambarkan

perekonomian suatu wilayah yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian.

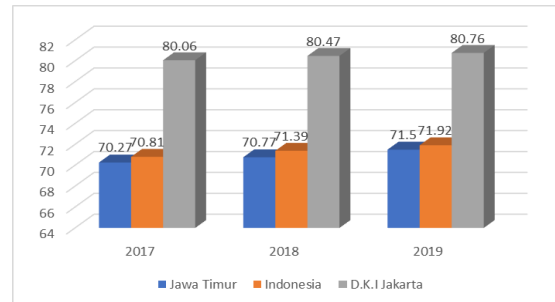
Peningkatan signifikan kenaikan upah minimum terjadi pada kota Surabaya dengan membandingkan tahun 2011 lalu dengan tahun 2019, dengan wilayah yang memiliki perekonomian yang tumbuh pesat tidak heran jika upah minimum di kota Surabaya paling besar di Provinsi Jawa Timur, tidak hanya di Kota Surabaya di sejumlah kota dan kabupaten lainnya pun sama mengalami kenaikan pada upah minimum, namun ada beberapa juga wilayah di kabupaten yang mengalami peningkatan yang pesat pada upah minimum seperti di Kota Surabaya, kabupaten Gresik, kabupaten Pasuruan, kabupaten Sidoarjo. Ketiga wilayah tersebut adalah wilayah Perindustrian ini juga menjadi penyebab kenaikan yang signifikan pada upah minimum pada ketiga kabupaten tersebut.



Gambar 5. Angkatan Kerja Jawa Timur 2011-2019

(Sumber: BPS data diolah penulis, 2022)

Angkatan kerja pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011–2019 terlihat pada data bahwa adanya kenaikan pada jumlah yang bekerja dan adanya penurunan pada jumlah yang menganggur, jumlah angkatan kerja pada kurun waktu tersebut yang penduduk produktif yang bekerja dengan jumlah sekitar 20,655,632 pada tahun 2019 dimana, pekerja lebih banyak daripada jumlah usia penduduk produktif yang menganggur, angka yang menganggur juga tetap pada angka 840.000 orang pekerja pada tahun 2019. Data tersebut juga di buktikan dengan angka tingkat persentase bekerja terhadap angkatan kerja pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 yaitu sebesar 96,08% menunjukkan bahwa memang lebih banyak usia produktif kerja yang terserap untuk bekerja dibanding dengan yang pernah bekerja atau tidak pernah bekerja sama sekali.



Gambar 6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 2017-2019

(Sumber: BPS data diolah penulis, 2022)

Proses untuk menciptakan pembangunan yang berkualitas dalam suatu daerah, juga tidak luput dari adanya peran dan serta dari penduduk atau masyarakat yang berkualitas. Jika perbedaan kondisi geografis, kondisi kekayaan sumber daya alam, dan kondisi sosial budaya yang menjadi penghambat suatu daerah untuk bisa maju, untuk bisa memajukan suatu pembangunan yang merata dengan kondisi yang berbeda-beda ini adalah dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan fokus meningkatkan kualitas hidup manusia pada wilayah/daerah tersebut.

Perkembangan data IPM pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017- 2019 masih di bawah rata- rata angka IPM nasional Indonesia, yaitu dengan rata-rata sebesar 70,8 poin, berbeda jauh dengan posisi pertama pada skala nasional yaitu provinsi D.K.I Jakarta dengan rata-rata sebesar 80,43 poin, sedangkan untuk posisi Indonesia sendiri dalam kurun waktu 2017–2019 nilai IPM dengan rata-rata sebesar 71,37 poin. Dalam kurun waktu 2017–2019 peningkatan nilai IPM pada Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan begitu juga dengan nilai IPM secara nasional, menandakan bahwa dalam terjadinya peningkatan kualitas taraf hidup di Indonesia semakin membaik baik dari segi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan peningkatan Pendapatan Nasional Bruto Indonesia.

Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui pembentukan modal. Pembentukan modal dapat diartikan sebagai proses pengumpulan aset atau peningkatan kekayaan yang digunakan untuk kesejahteraan di masa yang akan datang.

Pada tahun 2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto berkontribusi terhadap angka PDRB Jawa Timur sebesar 28,48 persen.

Komponen ini menjadi komponen penyumbang kedua terbesar angka PDRB Jawa Timur setelah komponen Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga. Begitu juga untuk wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur, mayoritas komponen PMTB menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang terbesar angka PDRB wilayah mereka. Tiga wilayah dengan share komponen PMTB terbesar adalah Kabupaten Pacitan yaitu sebesar 42,86 persen, Kabupaten Tuban sebesar 38,32 persen dan Kabupaten Madiun sebesar 36,46 persen. Sementara itu wilayah dengan share komponen PMTB terkecil adalah Kota Kediri (16,54 persen) dan Kabupaten Jember (18,75 persen). Hanya dua kabupaten/kota yang komponen PMTB tidak pada peringkat kedua yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, pada tahun 2019 laju pertumbuhan komponen PMTB tertinggi dicapai oleh Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 7,32 persen, kemudian Kota Batu sebesar 7,25 persen dan Kabupaten Bojonegoro sebesar 6,97 persen. Pertumbuhan PMTB terendah adalah Kabupaten Bangkalan (2,87 persen) dan Kabupaten Sampang (3,43 persen).

Dibuktikan dengan selalu meningkat jumlah postur APBD untuk Belanja daerah pada Provinsi Jawa Timur sebagai salah bentuk untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang ditandai adanya peningkatan tiap tahun pada Upah Minimum Regional pada Jawa Timur dan berkembangnya nilai IPM pada Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2011-2019. Hal ini juga didukung oleh Sidek dan Asutay (2020), dalam tulisannya mereka mengatakan bahwa, pengeluaran pemerintah yang meningkat digunakan untuk pengeluaran publik pada kesehatan, pendidikan, dan iklim bisnis guna mendorong ekspansi ekonomi melalui pertumbuhan. Pengeluaran pemerintah yang produktif dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan mendorong inovasi yang lebih besar, itu adalah komponen penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah selanjutnya juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan PDB yang lebih tinggi, melalui penciptaan lapangan kerja dan berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran pemerintah secara tidak langsung memperbaiki ketidaksetaraan sosial dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, angkatan kerja yang bekerja, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, investasi terhadap ketimpangan pendapatan pada seluruh Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan berbagai kebijakan di masa yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.

Dalam bukunya, Arsyad (2016) mengatakan bahwa Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis keynesian mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah ekonomi jangka panjang. Sedangkan teori harrod-domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan Agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan bagus (*steady growth*)

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu,

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh full employment dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.

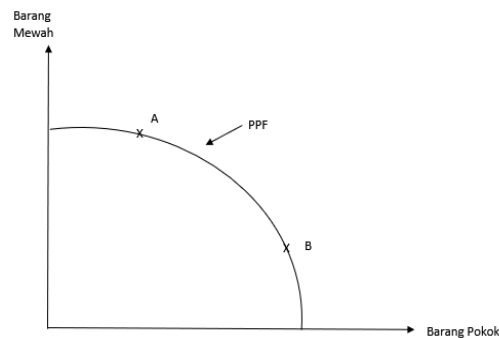
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung Marginal propensity to save besarnya tetap demikian juga rasio antara modal *output Capital output ratio* dan rasio tambahan modal (*Incremental Capital output ratio*).

Sedangkan menurut Arsyad (2016) dalam bukunya, menjelaskan teori Solow-Swan ini berpandangan bahwa, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kebakaran tenaga kerja.

Distribusi Pendapatan

Sebuah cara yang paling sederhana untuk menganalisis masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi (*production possibility curve*) atau batas kemungkinan produksi (*production possibility frontier*). Untuk menggambarkan analisis tersebut, produksi barang dalam perekonomian dibagi menjadi dua jenis barang, masing-masing adalah (1) barang-barang kebutuhan pokok (2) barang-barang mewah.

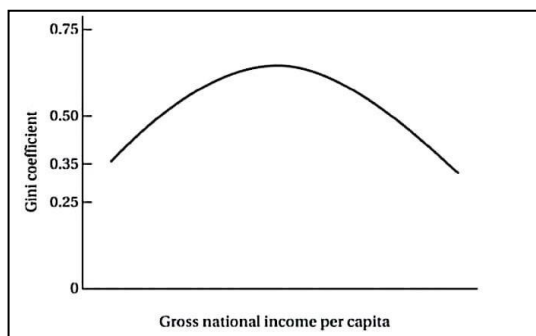
Gambar 10 menggambarkan bagaimana menentukan kombinasi antara barang pokok dan barang mewah, dengan menganggap bahwa produksi sekarang terjadi pada batas kemungkinan produksi (di mana semua sumber daya digunakan secara penuh dan efisien). Pada sumbu vertikal digambarkan semua barang mewah secara keseluruhan, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan barang pokok. Oleh karena itu, *Production Possibility Curve* (PPC) tersebut menggambarkan kombinasi maksimum dari kedua macam barang yang dapat dihasilkan perekonomian tersebut dengan cara menggunakan teknologi tertentu. Namun keadaan tidak menunjukkan secara jelas kombinasi yang mana di antara banyak kemungkinan yang akan dipilih.



Gambar 7. Produksi Barang Mewah dan Barang Pokok

(Sumber: Arsyad, 2016)

Teori "Kuznets Curve": Teori ini mengusulkan bahwa ketimpangan pendapatan akan mengikuti pola tertentu seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Teori Kuznets Curve menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi (seperti industri berat) cenderung memberikan manfaat kepada kelompok yang lebih kaya. Namun, seiring dengan waktu, ketika ekonomi mencapai tahap yang lebih matang dan sektor-sektor yang lebih inklusif berkembang (seperti sektor jasa), ketimpangan pendapatan akan mulai menurun.



Gambar 8. Kurva Kuznets

Indikator Distribusi Pendapatan

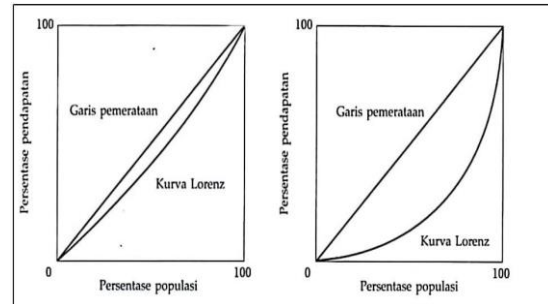
Koefisien Gini atau yang biasa dikenal dengan Indeks Gini merupakan alat sederhana untuk mengukur kesenjangan pendapatan suatu daerah. Penghitungan koefisien Gini didasarkan pada konsentrasi pendapatan di suatu wilayah relatif terhadap populasi tertentu, yang biasanya dibagi menjadi penduduk berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah, dan berpenghasilan tinggi. Semakin besar nilai koefisien Gini yang diperoleh suatu daerah maka semakin besar kesenjangan pendapatan. Indeks gini valid digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan karena memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan).

Arsyad (2016) menjelaskan secara matematis rumus koefisien Gini dapat disajikan sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

Dimana:

- KG = Angka Koefisien Gini
- X_i = Proporsi jumlah rumah tangga secara kumulatif kelas i
- Y_i = Proporsi pendapatan rumah tangga kumulatif kelas i



Gambar 9. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menjabarkan hubungan kuantitatif dan aktual antara persentase pendapatan yang diterima dan pendapatan secara total. Semakin jauh kurva lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), maka semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna adalah ditunjukkan oleh berimpit kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

Upah Minimum

Upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Dilakukan penetapan untuk sebagai jaring pengaman yang memiliki tujuan utama sebagai pelindung kemerosotan upah agar tidak berada dibawah daya beli bagi pekerja agar mampu memenuhi kebutuhan hidup layak minimum.

Berkaitan dengan upah, teori upah efisiensi mencoba menjelaskan keterkaitan antara pemberian upah yang tinggi dengan produktivitas tenaga kerja. Menurut Mankiw (2006) dalam bukunya mengungkapkan bahwa pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Ada empat tahapan dari penjelasan teori upah efisien:

1. Kesehatan Pekerja

Bagaimana upah memengaruhi produktivitas pekerja, menyatakan bahwa upah memengaruhi nutrisi para pekerja. Para pekerja yang dibayar dengan upah memadai bisa memenuhi banyak nutrisinya, dan pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif.

2. Perputaran Pekerja

Bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Semakin besar perusahaan membayar kerjanya, semakin besar insentif mereka untuk tetap bekerja dalam perusahaan tertentu. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan persyaratan untuk menarik dan melatih pekerja baru

3. Kualitas Pekerja

Menyatakan bahwa kualitas rata-rata dari tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya. Dengan membayar upah di atas tingkat ekuilibrium, perusahaan bisa menurunkan seleksi negatif, meningkatkan kualitas rata-rata tenaga kerjanya, dan mampu meningkatkan produktivitas.

4. Kerja Keras Pekerja

Bahwa upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Perusahaan dapat mengurangi Masalah kejahatan moral dengan membayar upah yang tinggi. Dengan upah yang lebih tinggi perusahaan memotivasi lebih banyak pekerjaan agar lebih tidak bermalasan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka.

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia (*Human Development*) adalah proses memperbesar pilihan orang. Pada prinsipnya, pilihan ini tidak terbatas dan berubah seiring waktu. Tetapi di semua tingkat perkembangan, tiga hal penting adalah agar orang-orang menjalani hidup yang panjang dan sehat, memperoleh pengetahuan dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar kehidupan yang layak. Jika pilihan penting ini tidak tersedia, banyak peluang lain tetap tidak dapat diakses (UNDP, 1990).

Kebenaran sederhananya adalah bahwa tidak ada hubungan otomatis antara pertumbuhan pendapatan dan kemajuan manusia. Perhatian utama dari analisis pembangunan seharusnya adalah bagaimana hubungan semacam itu dapat dibuat dan diperkuat. Kemajuan bidang ekonomi adalah factor paling penting dalam sebuah proses pembangunan namun unsur tersebut bukanlah satu-satunya factor yang dapat mendorong kemajuan sebuah

perekonomian. Tapi, pembangunan manusia juga harus menjadi bagian penting dari adanya pembangunan yang biasanya hanya dipandang dari segi finansial dan material semata (Hasan dan Aziz, 2018). Oleh karena itu suatu pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi- dimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem social dan ekonomi yang ada (Todaro dan Smith, 2006).

Sejak tahun 2010 komposisi penyusunan IPM telah diubah dengan mengganti beberapa indikator, yakni angka partisipasi kasar, angka melek huruf, produk domestik bruto menjadi mengikuti formulasi BPS yaitu:

- a. Umur Harapan Hidup
- b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
- c. Produk nasional bruto per kapita

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 2002).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006).

Investasi

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2015).

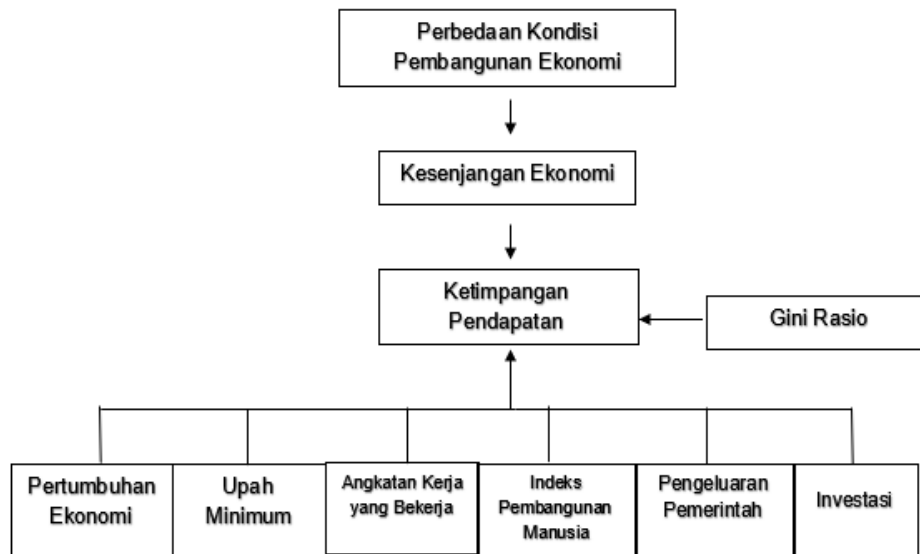
Beberapa faktor lain juga penting peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian, faktor – faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh
2. Suku bunga
3. Ramalan mengenai kondisi ekonomi di masa depan
4. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya
5. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan

Kerangka Pikir Penelitian

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat, peningkatan produksi, investasi, dan lapangan kerja. Upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja dengan menetapkan batas bawah penghasilan yang harus diterima.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kerja yang layak dan mencegah eksploitasi pekerja. Angkatan kerja yang bekerja mencerminkan tingkat partisipasi pekerja dalam kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketenagakerjaan dalam suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu negara, IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara daripada hanya menggunakan indikator ekonomi seperti PDB. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membiayai berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial. Ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Investasi yang tepat dapat memicu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan.



Gambar 10. Kerangka Pikir Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Berikut ini hipotesis yang penulis rumuskan berdasarkan kajian teori yang digunakan:

H1: Variabel Laju pertumbuhan ekonomi mempengaruhi Variabel Ketimpangan Pendapatan secara negatif dan signifikan.

H2: Variabel Upah minimum mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan secara negatif dan signifikan.

H3: Variabel Angkatan kerja yang bekerja mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan secara negatif dan signifikan.

- H4: Variabel Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan secara negatif dan signifikan.
- H5: Variabel Pengeluaran pemerintah mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan secara negatif dan signifikan.
- H6: Variabel Investasi mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan secara negatif dan signifikan.

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif, dengan lokasi penelitian berada pada Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Timur dengan periode penelitian yaitu 2011-2019 dengan jumlah sampel sebanyak 342, dan sumber data yang didapat dari BPS, DJPK, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel karena data yang diperiksa perpaduan *data cross section* dan *time series*. Dalam penelitian ini data sekunder digunakan sebagai bahan baku analisis, data diperoleh melalui cara dokumentasi. Terdapat beberapa pengujian yang dilakukan, seperti uji penentuan model estimasi, uji asumsi klasik, uji statistik. Adapun fungsi yang dipakai:

$$Gini_{it} = \alpha_0 + \beta_1 LajuPertumb_{it} + \beta_2 Upah_{it} + \beta_3 Kerjait + \beta_4 IPMit + \beta_5 Peng. Pemrinit + \beta_6 Investasi_{it}$$

Keterangan:

- Gini Rasio = Indeks Gini Kabupaten dan Kota
- LajuPertumb = Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota
- Upah = Upah Minimum Kabupaten dan Kota
- Kerja = Angkatan Kerja yang Bekerja Kabupaten dan Kota
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota
- Peng.Pemrin = Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota
- Investasi = Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten dan Kota
- A = Konstanta
- E = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Data

Variabel	N	Maksimum	Minimum	Mean	Standar deviasi
Gini	342	0.480000	0.230000	0.325702	0.040459
LajuPert	342	21.95000	-2.660000	5.636257	1.760318
Upah	342	3871053.	705000.0	1523745.	666829.3
kerja	342	1474934.	57101.00	518077.9	313897.1
IPM	342	82.22000	55.17000	69.06921	5.580775
Gov. ex	342	9.51E+12	4.26E+11	1.92E+12	1.23E+12
Inves	342	1.13E+14	6.23E+11	9.77E+12	1.57E+13

Sumber: Hasil Eviews (2022)

Pemilihan Model Regresi

Pengujian akan dilakukan dengan melakukan uji chow, uji hausman, uji lagrange multiplier. Adapun hasil regresi dari masing masing model yang di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d. f.	Prob
Cross section F	3.618801	(37,298)	0.0000
Cross section Chi Square	126.912956	37	0.0000

Sumber: Hasil Eviews, 2022

Kesimpulan dari hasil diatas adalah *model fixed effect* merupakan yang terbaik. Hal ini terlihat dari nilai Prob. Cross section F 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari α (0,05) yang berarti H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.430802	6	0.0759

Sumber: Hasil Eviews, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji hausman diatas dapat disimpulkan model yang terbaik adalah model *random effect*. Hal ini dapat dilihat dari nilai Prob. Cross section F 0,0759 yang berarti H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak karena Nilai tersebut lebih besar dari α (0,05).

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange-Multiplier

Test Hypotesis			
Breusch-Pagan	Cross-section	Time	Both
	54.05824 (0.0000)	102.2492 (0.0000)	156.3074 (0.0000)

Sumber: Hasil Eviews, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas diketahui nilai *probability cross-section Breusch-Pagan* yaitu 0.0000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$, sehingga model *Random Effect* lebih diterima dibandingkan dengan model *Common Effect*.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian kemampuan semua variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	0.231843
S.E. of regression	0.028255

Sumber: Hasil Eviews, 2022

Berdasarkan regresi dengan model fixed effect didapatkan nilai koefisien Adjusted R-squared sebesar 0.231843. nilai tersebut berarti variaebel laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, angkatan kerja yang bekerja, indeks

pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah dan investasi mampu menjelaskan variable ketimpangan pendapatan sebesar 23%. Sementara 77% dijelaskan oleh variable diluar model penelitian.

Uji Simultan F

Pengaruh simultan semua variabel independen yang digunakan dalam model terhadap variabel dependen diperiksa menggunakan uji statistik F.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

Prob(F-statistic)	0.000000
-------------------	----------

Sumber: Hasil Eviews, 2022

Tabel diatas menunjukkan nilai Prob. F-statistik sebesar 0.000000 nilai Prob. F-statistik $< \alpha$ yang artinya H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima. Kesimpulan keseluruhan yang dapat ditarik adalah bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi secara signifikan oleh semua variabel bebas dengan simultan.

Uji Simultan T

Untuk memastikan bagaimana masing masing variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat digunakan uji statistik t. Berikut adalah hasil pengujian yang didapatkan:

Tabel 7. Hasil Uji Statistik T

Variabel	Coefficien t	t-Statistic	Prob .
C	-0.022238	-0.486514	0.6269
Laju.Pert	-0.000612	-0.612695	0.5405
Upah	-2.32E-08	-4.837313	0.0000
Kerja	-1.36E-08	-0.862736	0.3889
IPM	0.005263	7.972111	0.0000
Gov.Exp	2.00E-14	4.360874	0.0000
Invest	-8.35E-16	-2.610613	0.0094

Sumber: Hasil Eviews, 2022

Interpretasi dari hasil uji diatas adalah:

1. Variabel laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena $\text{Prob.t} (0,5405) > (0,05)$.
2. Variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena $\text{Prob.t} (0,0000) < (0,05)$.
3. Variabel angkatan kerja yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena $\text{Prob.t} (0,3889) > (0,05)$.
4. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena $\text{Prob.t} (0,0000) < (0,05)$.
5. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena $\text{Prob.t} (0,0000) < (0,05)$.
6. Variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena $\text{Prob.t} (0,0094) < (0,05)$.

Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa, laju pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Ketika perekonomian tumbuh dengan cepat, ada potensi peningkatan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Namun pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menunjukkan hasil yang bagus, meskipun angka Gini Rasio dengan rata-ratanya sebesar 0,38 yang masih dalam kategori sedang yang artinya adalah, masih terdapat daerah yang timpang pada pendapatannya antar Kabupaten dan Kota. Seperti daerah dengan sektor-sektor unggulan seperti Kota Surabaya, Kediri, Malang, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo yang memiliki sektor unggulan pada industri yang tidak dimiliki pada daerah lain maka pertumbuhan ekonomi yang hanya fokus pada satu sektor tidak memberikan manfaat yang merata dan ketimpangan pendapatan

cenderung meningkat. Kemudian juga penurunan pertumbuhan ekonomi berkorelasi terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas yang hanya ada pada daerah yang sudah maju, sehingga hanya sebagian besar manfaat ekonomi yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.

Penelitian dari Huh et al (2020) menunjukkan bahwa, globalisasi memiliki dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui integrasi intraregional. Dampak positif ini lebih terasa di negara-negara berpenghasilan tinggi. Namun, ketika pendapatan menurun, dampak positif globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi melemah, dan globalisasi juga dikaitkan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Peningkatan ketimpangan pendapatan ini terutama terjadi karena integrasi ekstra regional. Bagi negara-negara berpenghasilan rendah, efek positif globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi lemah, sementara ketimpangan pendapatan meningkat secara signifikan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi intraregional dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, temuan tersebut menekankan bahwa integrasi intraregional dalam infrastruktur, konektivitas, dan pengaturan kelembagaan penting untuk kinerja ekonomi, terutama dalam menciptakan landasan yang lebih baik untuk globalisasi.

Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa upah minimum memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Rata-rata upah minimum pada Kota dan Kabupaten Se-Jawa Timur menunjukkan tren yang menaik dalam kurun waktu 2011-2019. Hal ini menunjukkan bahwa, Upah minimum yang ditetapkan pada tingkat yang wajar dapat membantu meningkatkan pendapatan pekerja dengan upah rendah. Ini dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara pekerja dengan upah tinggi dan rendah. Dalam situasi di mana upah minimum dinaikkan secara proporsional, pekerja dengan upah rendah biasanya mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, dan

peningkatan upah minimum dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan. Tetapi perlu diperhatikan juga dalam menetapkan kebijakan upah minimum, perlu diperhatikan faktor lain seperti inflasi, struktur ekonomi, produktivitas tenaga kerja, dan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan redistribusi pendapatan.

Berdasarkan penelitian dari Storm dan Naastepad (2013) dalam Lavoie dan Stockhammer (2013) Peningkatan dalam pertumbuhan upah memiliki efek positif pada pertumbuhan produktivitas pekerja, hal ini juga harus imbangi dengan cara perusahaan melakukan meningkatkan investasi dalam hal peningkatan produktivitas untuk mempertahankan daya saing bagi perusahaan atau dengan cara meningkatkan kontribusi pekerja dalam hal proses produksi. Hal tersebut bisa terjadi karena terciptanya motivasi pekerja yang meningkat dan kondisi kesehatan dan gizi mereka membaik.

Analisis Pengaruh Angkatan Kerja yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa, angkatan kerja yang bekerja memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jumlah tenaga kerja terbesar ada pada Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jember dengan total diatas satu juta pekerja tiap tahunnya dalam kurun waktu 2011-2019. Namun ketimpangan pendapatan juga dapat terjadi akibat perbedaan pendapatan antara sektor-sektor ekonomi yang berbeda. Jika sektor-sektor yang lebih produktif dan menghasilkan pendapatan yang tinggi cenderung mendominasi ekonomi suatu negara atau daerah, sementara sektor-sektor dengan pendapatan rendah seperti sektor pertanian atau informal kurang berkembang, ketimpangan pendapatan dapat meningkat.

Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan efisiensi produksi tenaga kerja. Namun, tidak semua tenaga kerja memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, sehingga perekonomian mendapatkan tenaga kerja yang

tidak kompeten dengan upah yang melebihi produktivitasnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja ahli lebih memilih daerah yang lebih maju dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, rendahnya produktivitas pekerja juga berkontribusi pada pendapatan yang rendah. Dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, angkatan kerja perlu bekerja secara efektif di daerah yang belum maju. Pendidikan dan kompetensi pekerja juga perlu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pasar tenaga kerja yang kompetitif.

Meskipun berdasarkan hasil statistik dapat menurunkan ketimpangan pendapatan namun hasilnya tidak signifikan hal ini dijelaskan dalam penelitian Utama et al (2017) mengatakan bahwa, anggaran pendidikan berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah tetapi belum mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi kompetensi kerja. Perekonomian mendapatkan supply pekerja yang tidak kompeten tetapi dibayar dengan upah yang melebihi produktivitasnya. Akibatnya, pekerja yang tidak kompeten menjadi beban perekonomian dan menimbulkan dampak negatif. Dampak belanja pendidikan semakin tidak signifikan karena meskipun individu berhasil mendapatkan pendidikan tinggi tetapi pekerjaan yang tersedia terbatas.

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa, indeks pembangunan manusia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijadikan indikator penting dalam menentukan seberapa sukses pembangunan manusia telah berkembang di lokasi tertentu. Ketika nilai nilai IPM dipraktikkan, kemajuan dapat dilihat secara lebih menyeluruh melalui aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga derajat kesejahteraan tergambar lebih tepat sesuai dengan kondisi realita yang sebenarnya.

Angka IPM pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur mengalami kenaikan terus

menerus dalam kurun waktu 2011-2019, artinya fokus pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur menempatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun perlu diperhatikan kembali, terdapat beberapa daerah yang memiliki nilai IPM tinggi maupun rendah, seperti pada Kota Surabaya yang memiliki IPM tertinggi di Jawa Timur dan yang terendahnya ada pada Kabupaten Sampang. Memang tidak adil jika langsung membandingkan kedua daerah tersebut, tetapi perbedaan pada nilai IPM daerah-daerah yang ada pada Jawa Timur menunjukkan bahwa masih terdapat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ketika ada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata beberapa kelompok masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada kelompok lain. Kemudian terkait dengan akses terbatas kelompok masyarakat terhadap sumber daya seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, jika kelompok-kelompok tertentu masih menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses sumber daya ini, ketimpangan pendapatan dapat tetap bertahan atau bahkan meningkat. Peningkatan nilai IPM di daerah dengan minim kegiatan ekonomi, tidak dapat memberikan pengaruh yang lebih efektif untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, jika harus dibandingkan dengan wilayah yang menjadi konsentrisasi ekonomi akan lebih menerima manfaat dari kenaikan nilai IPM pada wilayah tersebut. Daerah dengan nilai IPM tinggi akan menerima manfaat dengan menyerap tenaga kerja terdidik dan daya beli masyarakat pun lebih tinggi, dibandingkan dengan wilayah yang IPM rendah yang peningkatannya tidak sebesar dengan wilayah yang memiliki IPM tinggi.

Sejalan dengan penelitian dari Febriyani dan Anis (2021) yang meneliti mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa, IPM tidak berpengaruh dalam penurunan ketimpangan pendapatan. Penelitian lain dari Putri et al (2015) juga sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, Ketidakmerataan IPM antar daerah-daerah akan menyebabkan perbedaan tingkat kemajuan antara daerah yang lebih maju dengan kualitas manusia yang lebih baik dan daerah

yang kurang maju dengan kualitas manusia yang rendah. Dampaknya adalah pembangunan yang tidak seimbang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, ketimpangan pendapatan antar daerah akan semakin membesar.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa, pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengeluaran pemerintah yang merata dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan, dengan meningkatkan pengeluaran pada sektor-sektor yang membutuhkan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di daerah yang kurang berkembang, maka masyarakat di daerah tersebut dapat meningkatkan akses terhadap layanan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat di seluruh wilayah untuk berkembang.

Tiap daerah pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur pada pengeluaran pemerintahnya mengalami kenaikan terus menerus tiap tahunnya dalam kurun waktu 2011-2019, pengeluaran tertinggi ada pada Kota Surabaya, dan terendah ada pada Kota Mojokerto. Namun mengacu pada hasil perhitungan statistik yang sudah dilakukan bahwa pengeluaran pemerintah sebaliknya meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Hal ini dapat disebabkan karena pengeluaran pemerintah hanya difokuskan pada sektor atau wilayah yang sudah berkembang, sementara wilayah atau kelompok masyarakat yang lebih miskin ditinggalkan, maka kesenjangan pendapatan bisa semakin membesar. Pengeluaran pemerintah tidak dikelola dengan efisien dan efektif, maka potensi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dapat terhambat. Jika sumber daya publik tidak digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tetapi sebagian besar mengalir ke birokrasi yang tidak efektif, proyek yang tidak menguntungkan, atau pengeluaran yang tidak relevan, maka kesenjangan pendapatan dapat tetap tinggi. Kemudian masih terdapat adanya korupsi dan nepotisme dalam pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan ketimpangan

pendapatan yang lebih besar. Pajak regresif artinya pajak tersebut memberikan beban yang lebih besar pada kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah, maka pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperburuk ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan penelitian dari Utama et al (2017) menunjukkan bahwa, pengaruh pemberian subsidi dan bantuan sosial pada penelitian ini tidak berpengaruh, baik terhadap pertumbuhan maupun ketimpangan. Meskipun begitu, bila melihat pengaruh subsidi/transfer pada jangka pendek terhadap ketimpangan menunjukkan dampak positif. Artinya pemberian subsidi/bansos yang dilakukan pemerintah memiliki potensi yang baik untuk mengurangi ketimpangan dalam jangka pendek namun pengaruhnya tidak signifikan. Selain subsidi/bansos, jenis belanja pemerintah lainnya juga tidak dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan, baik pada jangka pendek maupun panjang. Belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tidak ada satupun yang mengurangi ketimpangan. Permasalahan utamanya terletak pada alokasi anggaran, sebaran sarana, dan kualitas. Namun, terdapat satu peubah yang dapat mengurangi ketimpangan yakni pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat mengurangi ketimpangan pada jangka pendek sebesar 0,003% tetapi tidak signifikan pada jangka panjang. Bila dikaitkan dengan pengaruh pajak yang hanya signifikan dalam jangka pendek maka pajak berhasil mengurangi pendapatan disposibel orang kaya tetapi tidak bisa mengurangi akumulasi kekayaannya.

Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa, investasi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Investasi yang didistribusikan secara merata dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan pada kurun waktu 2011-2019. PMTB merupakan komponen PDRB terbesar kedua untuk Jawa Timur yaitu sebesar 27,47 persen setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 58,88 persen. Terdapat beberapa daerah yang memiliki nilai PMTB tertinggi dan terendah, tertinggi ada pada Kota Surabaya dan terendah ada pada Kota Blitar. Menjadi menarik bahwa investasi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur hal ini disebabkan karena, investasi yang signifikan dalam sektor-sektor ekonomi tertentu dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Penelitian dari Chen (2016) menunjukkan bahwa, FDI secara langsung berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan perkotaan-pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja untuk tenaga kerja tidak terampil pedesaan, limpahan pengetahuan dari pergerakan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi ekonomi lokal, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga pedesaan, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan perkotaan-pedesaan.

Penelitian lain dari Zolfaghari et al (2020) menunjukkan bahwa, peningkatan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan) dan ekonomi (energi, air, TIK) mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan. Terlepas dari kenyataan bahwa koefisiennya positif, intensitas dampaknya berbeda. Bahkan, investasi pada infrastruktur kesehatan, pendidikan, TIK, energi, dan air memiliki efek terbesar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisa pembahasan:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dalam hal koefisien, tetapi hasilnya tidak signifikan karena masih ada ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut, terutama fokus pada sektor industri.

2. Upah Minimum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena upah mempengaruhi nutrisi para pekerja, dan pekerja yang lebih sehat cenderung lebih produktif.
3. Angkatan Kerja yang Bekerja dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dalam hal koefisien, tetapi secara hasilnya tidak signifikan karena tenaga kerja tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau pasar tenaga kerja yang kompetitif.
4. Indeks Pembangunan Manusia dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan karena ketidakmerataan IPM antar daerah dapat menyebabkan perbedaan tingkat kemajuan.
5. Pengeluaran Pemerintah dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan karena lebih difokuskan pada sektor-sektor dan wilayah yang sudah maju.
6. Investasi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan karena investasi di sektor ekonomi tertentu dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses ke fasilitas dan layanan kesehatan dan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan.
2. Penetapan kebijakan upah minimum yang proporsional dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas tenaga kerja dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan angkatan kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan inklusif dan berkualitas, kesehatan dan pelayanan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur dapat membantu mengurangi ketimpangan

pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran yang cerdas dan tepat sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta tidak mengabaikan daerah pedesaan atau wilayah yang terpinggirkan. Pengelolaan yang efektif dan efisien diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Mendorong investasi swasta dalam sektor-sektor seperti infrastruktur, teknologi, dan industri manufaktur dapat meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Kebijakan yang mendukung investasi inklusif, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan ekonomi dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

IMPLIKASI

Implikasi dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang dalam menjelaskan tentang ketimpangan pendapatan. Maka dari itu pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah, data untuk pengeluaran pemerintah pada DJPK hanya tersedia dari tahun 2011, dan data penetapan upah didapat dari Surat Keputusan Gubernur sehingga dikumpulkan satu per satu

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Chen, C. (2016). The impact of foreign direct investment on urban-rural income inequality. *China Agricultural Economic Review*, 8(3), 480–497. doi:10.1108/caer-09-2015-0124
- Dumairy. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Eliza, Y. (2015) 'Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat Efrizal Hasan, Syamsul Amar, Ali Anis', *Jurnal Pekbis*, 7(3), pp. 200–210.sher
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(4), 9-16.
- Hasan, Muhammad and Azis, Muhammad (2018) *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Edisi Kedua). CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu, Makassar.
- Huh, H., & Park, C. (2020). A New Index of Globalization: Measuring Impacts of Integration on Economic Growth and Income Inequality. *The World Economy*. doi:10.1111/twec.12998
- Lavoie M., Stockhammer E. (2013) Wage-led Growth: Concept, Theories and Policies. In: Lavoie M., Stockhammer E. (eds) Wage-led Growth. *Advances in Labour Studies*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137357939_2
- Mangkoesebroto, Guritno. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mankiw, Gregory N. 2006. *Makroekonomi 6th Edition*. New York: Worth Publishers.
- Nangarumba, M. (2015) 'Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 7(2), pp. 9–26. Available at: <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5326>.
- Putri, Yosi Eka, Syamsul Amar, dan Hasdi Aimon (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*
- Sarwar, A. et al. (2020) 'Financial development, human capital and its impact on economic growth of emerging countries', *Asian Journal of Economics and Banking*, ahead-of-print(ahead-of-print). doi: 10.1108/ajeb-06-2020-0015.
- Sidek, N. Z. M. and Asutay, M. (2020) 'Do government expenditures and institutions drive growth? Evidence from developed and developing economies', *Studies in Economics and Finance*. doi: 10.1108/SEF-10-2019-0412.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makroekonomi Teori dan Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta: Erlangga
- Tri Wahyudi, Setyo. 2016. *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UNDP. 1990. *Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development*. New York. <http://www.hdr.undp.org/en/reports/global/hdr-1990>.
- Utama, Z. S., Khusaini, M. and Wahyudi, S. T. (2017) 'Kebijakan Fiskal di Persimpangan, Pro Growth atau Pro Poor?', *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(2), pp. 67–81. doi: 10.33105/itrev.v2i2.28.
- Zolfaghari, M., Kabiri, M., & Saadatmanesh, H. (2020). Impact of Socio-Economic Infrastructure Investments on Income Inequality in Iran. *Journal of Policy Modeling*. doi:10.1016/j.jpolmod.2020.02.004